

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DI MODERASI OLEH KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**Muskin Hadi, Hartaty Hadady, Suwito**

Universitas Khairun Ternate

ARTICLE INFO

**Keyword:** *Quality of Financial Reports, Principles of Good Government Governance, Human Resource Competence*

**Kata Kunci:** Kualitas Laporan Keuangan, Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Corresponding author:

**Muskin Hadi**

muksinhadi02@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to determine and test the Influence of Good Government Governance Principles on the Quality of Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. This study uses a quantitative approach, where the data used is in the form of numbers or quantitative data that has been processed. The population that is the focus of this study is the regional apparatus that is directly involved in the management of regional finances with, The sample in this study was represented by 4 parts, each OPD was taken by 4 respondents consisting of the Head of Didas/Agency, Secretary, Treasurer, Head of Program Sub-Division/Head of Finance Sub-Division. The data collection method was carried out through survey techniques and using questionnaires. The analysis method for testing the hypothesis in this study was Smart Partial Least Squares (SmartPLS 4.0).*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Government Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Di Moderasi Oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka atau data kuantitatif yang telah diolah. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dengan, Sampel dalam penelitian ini diwakili 4 bagian masing-masing OPD diambil 4 orang responden yang terdiri dari Kepala Didas/Badan, Sekretaris, bendahara, Kasubag Program/Kasubag Keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei dan menggunakan kuesioner. Metode analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Smart Partial Least Squares (SmartPLS 4.0).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Laporan keuangan daerah merupakan kompilasi data yang berkaitan dengan berbagai komponen kekayaan dan struktur keuangan, berfungsi sebagai representasi empiris dari hasil yang berasal dari kegiatan tertentu, yang dapat digunakan oleh beberapa pemangku kepentingan sebagai dasar untuk perencanaan strategis, pengawasan, dan pengambilan keputusan Kasian *et al.*, (2024). Akibatnya, informasi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan mematuhi atribut kualitatif relevansi, keandalan, komparabilitas, dan pemahaman (Mahmudi, 2021)

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif merupakan indikator penting keberhasilan dalam pengelolaan aset pemerintah, terutama mengenai masalah keuangan yang sangat penting Maimanah *et al.*, (2024). Pemberlakuan tata kelola yang bertanggung jawab di tingkat pusat dan regional sangat penting sebagai tolok ukur untuk aktualisasi *Good Governance* yang optimal. Seperti yang diartikulasikan oleh Makalikis *et al.*, (2022). Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan publik merupakan landasan penting bagi konsep *Good Governance*, yang berfungsi sebagai prasyarat mendasar untuk kerangka demokrasi dan ekonomi yang tulus (Makalikis *et al.*, 2022).

Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam *good governance* yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari yang pertama mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Yaya & Wahyuli, 2019)

Akuntabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas mencakup pemberian informasi keuangan kepada publik sehingga publik mengetahui aliran dana dalam laporan keuangan yang digunakan pemerintah dan dapat menilai tanggung jawab dari pemerintah atas semua program yang dilaksanakan. Laporan keuangan pemerintah yang akuntabel menjadi bukti dari kekonsistenan pemerintah dalam memenuhi standar yang ada. Semakin baik akuntabilitas, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Pratiwi *et al.*, 2022).

Adapun penelitian terdahulu menurut Pratiwi *et al* (2022), Murniati (2021), Vidyasari & Suryono (2021), dan Suryani & Ismail (2018) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 4 Sedangkan, penelitian Riyanti (2017) dan Muktiadji *et al* (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Prinsip *Good Government Governance* kedua yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah transparansi. Transparansi merupakan cara pemerintah untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan bersih, jujur, dan tidak ada yang disembunyikan. Transparansi dibangun berdasarkan dengan arus informasi yang bebas (Yaya & Wahyuli, 2019). Informasi pemerintahan harus dapat dipahami dan diakses oleh pihak yang berkepentingan. Organisasi sektor publik yang tidak menerapkan transparansi akan berdampak pada penyalahgunaan sumber daya. Sehingga alokasi sumber daya tidak efisien dan terjadi penyelewengan tugas terutama dalam laporan keuangan (Pratiwi *et al.*, 2022).

Adapun penelitian terdahulu menurut Pratiwi *et al* (2022), Rahayu & Dewi (2022), Murniati (2021), dan Suryani & Ismail (2018) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, penelitian Wiguna (2019) dan Yaya &

Wahyuli (2019) mengungkapkan bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan

Selain itu terdapat Prinsip *good governance* ketiga yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan peran individu dalam penentuan anggaran pemerintah yang akan berpengaruh pada proses evaluasi dan kontrol kerja pemerintahan serta meminimalkan penyelewengan (Pratiwi *et al.*, 2022). Masukan yang diberikan sumber daya manusia dalam penyusunan arah maupun kebijakan anggaran akan mewujudkan anggaran yang efektif. Semakin tinggi partisipasi anggaran, kualitas laporan keuangan pemerintah meningkat

Penelitian Pratiwi *et al.*, (2022), Liu (2020), Suryani & Ismail (2018), dan Hamsinar (2017) mengungkapkan bahwa partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian Masnila *et al.* (2021) dan Imelia *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa partisipasi memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang baik, serta memberikan solusi bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengatasi hambatan dalam proses penyusunan Kabupaten Halmahera Tengah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2023 seperti yang dilansir dalam website ([GovHalmahera](#)) ([Dapur Akuntansi](#)). mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai variabel moderasi, kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara *good government governance* dan kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten memiliki pengetahuan teknis yang memadai, pemahaman yang mendalam terhadap regulasi keuangan, serta kemampuan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *good government governance* ke dalam praktik penyusunan laporan keuangan. Tanpa kompetensi yang memadai, implementasi prinsip-prinsip *good government governance* tidak akan optimal, dan laporan keuangan yang dihasilkan berisiko kehilangan akurasi, relevansi, dan transparansi.

Pentingnya Kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi juga disebabkan oleh perannya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip *good government governance*. Misalnya, kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi melalui sistem akuntansi berbasis digital. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan sumber daya manusia untuk menerjemahkan prinsip partisipasi menjadi kolaborasi yang lebih efektif antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil tersebut termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Halmahera Tengah. Hal ini bisa terlihat karena adanya peningkatan atas perbaikan di dua tahun lalu ketika LKPD Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena BPK menilai sistem pengendalian pencatatan barang milik daerah (aset tetap) belum memadai. Peningkatan tersebut diharapkan bisa mendorong akuntabilitas, transparansi dan partisipasi anggaran di Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengelola keuangan daerah.

## KAJIAN TEORITIK

### Teori keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Teori yang menjelaskan hubungan principal dan agen ini salah satunya berkat pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Suryana dan Sadeli, 2015).

### Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan bagian dari *Agency theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa pimpinan sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders maupun shareholders. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, *steward* mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk tujuan organisasi (Anton, 2010). Dalam penelitian ini menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Teori *Stewardship* menyatakan bahwa pimpinan akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Para pimpinan digambarkan sebagai *good steward* (Huse, 2007), dimana para pimpinan tersebut setia menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Para pimpinan tidak termotivasi pada materi dan uang, tetapi mereka termotivasi oleh keinginan diri sendiri dalam mengaktualisasi diri dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan, serta menghindari konflik kepentingan.

### Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2011:143).

Laporan keuangan merupakan catatan informasi terkait keuangan pemerintahan dalam satu periode keuangan guna menggambarkan hasil kinerja suatu organisasi (Sujana et al., 2020). Laporan keuangan berfungsi sebagai alat yang ditunjukkan kepada pemegang saham sebagai bentuk bukti fisik dalam hal keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran berjalan (Pratiwi et al., 2022).

Terdapat empat indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Sujana et al (2020) sebagai berikut:

1. Relevan

2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

### **Prinsip-prinsip Good Governance**

Kunci pembahasan penting dari *Good Governance* terdapat pada prinsip-prinsip *Good Governance* itu sendiri. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini: Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *Good Governance* adalah sebagai berikut (UNDP, 1997):

#### **Akuntabilitas (*accountability*)**

Akuntabilitas (*accountability*), usaha meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Yaya & Wahyuli, 2019). Dalam hal tersebut, pemerintah daerah mesti mampu memberi informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik. Dalam pemerintah daerah akuntabilitas didefinisikan sebagai keharusan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan yaitu masyarakat (Murniati, 2021).

Akuntabilitas merupakan bagian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Saleh et al., 2021). Organisasi publik harus berhasil dan efisien mengelola keuangan agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Segala bentuk aktivitas maupun kegiatan dalam organisasi sektor publik harus dipertanggungjawabkan untuk menghindari ketidakefektifan organisasi. Dengan adanya akuntabilitas yang baik dalam organisasi publik atau pemerintahan daerah maka laporan keuangan pemerintahan semakin berkualitas (Yaya & Wahyuli, 2019).

Adapun indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (Yaya & Wahyuli, 2019) dibagi menjadi lima sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

#### **Transparansi (*transparency*)**

Transparansi (*transparency*), menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Pratiwi et al (2022) indikator transparansi, sebagai berikut:

1. Informatif
2. Keterbukaan
3. Pengungkapan

### **Partisipasi Anggaran**

Partisipasi (*participation*), mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut Pratiwi et al (2022) partisipasi anggaran adalah peran serta individu sebagai sumber daya manusia dalam menyalurkan tujuan, pertimbangan, serta kepentingannya dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Menurut Achmadi dkk (2002) partisipasi merupakan salah satu kunci keberhasilan 18 pelaksanaan otonomi teritorial karena menyangkut aspek kontrol dan aspirasi. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi lebih baik apabila terdapat partisipasi anggaran, dimana aparatur dalam pemerintahan juga ikut andil dalam terwujudnya pengelolaan anggaran (Pratiwi et al., 2022).

Indikator partisipasi anggaran menurut Pratiwi et al (2022), yaitu:

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran
2. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran
3. Kebutuhan memberikan pendapat

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Manusia adalah “unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi” Darwanis dan Mahyani (2009). Karena sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu “sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai” Indriasih (2014).

Guna menilai kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, “dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut” Trisaputra (Tjiptoherijanto; 2013). Responsibility atau tanggung jawab tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, variabel kompetensi SDM dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator, yaitu

1. pengetahuan (*knowledge*),
2. keterampilan (*skill*), dan

3. sikap (*attitude*).

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PIKIR**

#### **Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Studi terbaru oleh Napitupulu et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi keuangan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian dari Susanto dan Rahayu (2022) mengungkapkan bahwa transparansi juga berdampak pada akuntabilitas dan kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalisir potensi kesalahan atau manipulasi data. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Pratiwi et al., 2022); (Rahayu & Dewi, 2022); (Murniati, 2021); dan (Suryani & Ismail, 2018). menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa aparatur pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam penyusunan anggaran, namun juga ikut andil dalam manajemen keuangan hingga pemerintah daerah melaporkan segala kegiatannya berupa laporan keuangan. Apabila aparatur pemerintahan berpartisipasi dengan baik dalam penyusunan anggaran dan manajemen keuangan, maka kualitas laporan keuangan yang telah disusun pemerintah akan meningkat (Philadelphina et al., 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ((Pratiwi et al., 2022); (Imelia et al., 2021); dan (Suryani & Ismail, 2018)) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian terbaru oleh Lestari et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Di sisi lain, rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas dan reliabilitas informasi yang disajikan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Pratiwi et al., 2022); (Murniati, 2021); (Vidyasari & Suryono, 2021); dan (Liu, 2020)) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Akuntabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **Penerapan Kompetensi Sumber daya manusia memoderasi Prinsip-prinsip Good governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

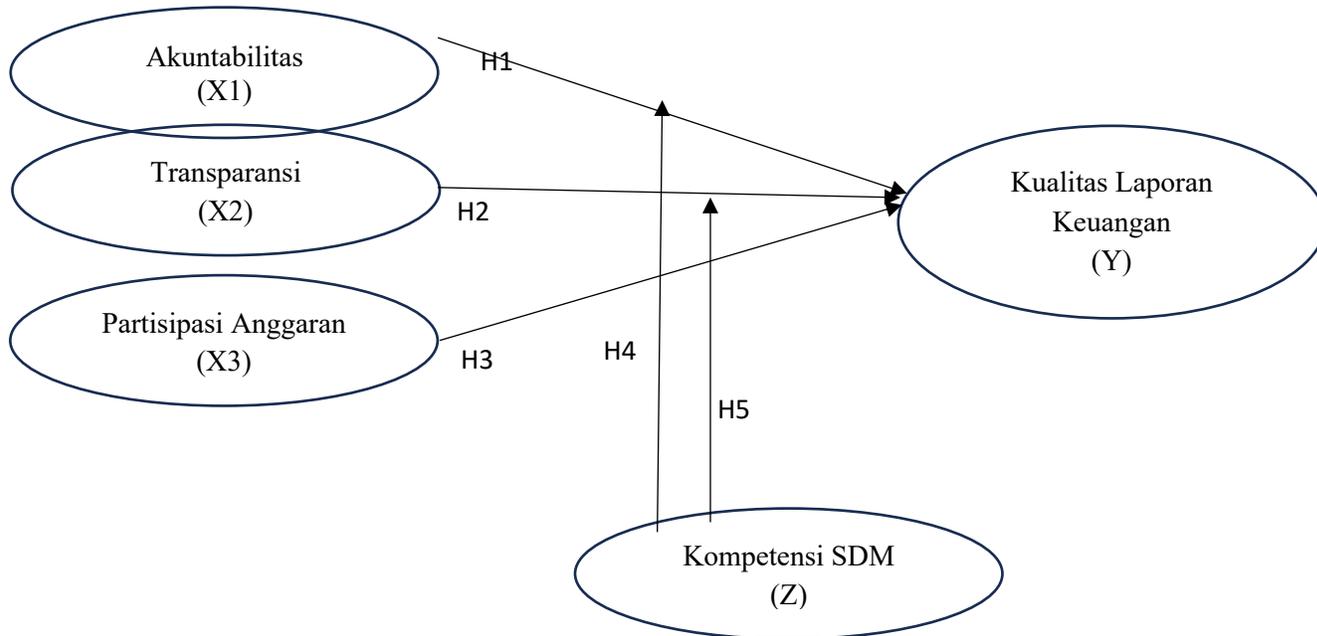
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisanatalia (2024), menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan prinsip tanggung jawab berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi transparansi dan tanggungjawab terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan prinsip akuntabilitas yang efektif sangat bergantung pada kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami tanggung jawab mereka dan mampu mengelola kewajiban pelaporan secara profesional. Sumber Daya Manusia yang kompeten akan memastikan bahwa

prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dengan benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

H4: Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan.

### Kerangka Pikir



**GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR**

## METODE PENELITIAN

### Desain penelitian

Desain penelitian merujuk pada proses keseluruhan yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan berbentuk angka atau data kuantitatif yang telah diolah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei dan menggunakan kuesioner, dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia.

### Populasi

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Sampel dalam penelitian ini diwakili 4 bagian masing-masing OPD diambil 4 orang responden yang terdiri dari Kepala Didas/Badan, Sekretaris, bendahara, Kasubag Program/Kasubag Keuangan. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Smart Partial Least Square* versi 4 (PLS)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas (*Convergent Validity*)

*Convergent Validity* adalah pengukuran validitas indikator refleksif sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari *outer loading* dari masing-masing indikator variabel. Nilai indikator dikatakan *valid*, apabila indikator menjelaskan variabel kontruknya dengan nilai > 0,7 atau biasa yang disebut dengan *rule of thumbs* (Ghozali dan Latan, 2015). Sedangkan nilai yang dibawah 0,7 sebaiknya lakukan penghapusan pada indikator tersebut. Uji validitas terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen berbeda yang mengukur konstruk yang samamempunyai kolerasi tinggi. Berikut hasil *output outer loading* pada tabel 4.7.

**Tabel 4.6 Output Outer Loading Awal X1,X2,X3, Z dan Y**

	Akuntabilitas	Kompetensi SDM	Kualitas Laporan Keuangan	Partisipasi Anggaran	Transparansi Anggaran	Kompetensi SDM x Akuntabilitas	Kompetensi SDM x Transparansi Anggaran
X1.1	0,855						
X1.2	0,874						
X1.3	0,882						
X1.4	0,888						
X1.5	0,883						
X1.6	0,871						
X1.7	0,570						
X2.1					0,861		
X2.2					0,844		
X2.3					0,803		
X2.4					0,794		
X2.5					0,682		
X2.6					0,799		
X2.7					0,771		
X3.1				0,915			
X3.2				0,921			
X3.3				0,829			
X3.4				0,848			
X3.5				0,768			
Y.1			0,729				
Y.10			0,789				
Y.11			0,798				
Y.2			0,753				
Y.3			0,833				
Y.4			0,850				
Y.5			0,860				
Y.6			0,889				

Y.7			0,844				
Y.8			0,874				
Y.9			0,837				
Z.1		0,804					
Z.2		0,858					
Z.3		0,876					
Z.4		0,849					
Z.5		0,916					
Z.6		0,901					
Z.7		0,917					
Z.8		0,909					
Z.9		0,893					
Kompetensi SDM x Akuntabilitas						1,000	
Kompetensi SDM x Transparansi Anggaran							1,000

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Variabel Akuntabilitas (X1) memiliki sembilan item dengan nilai loading faktor masing-masing 0,855, 0,874, 0,882, 0,888, 0,883, 0,871 yang sudah mencapai *rule of thumbs* yaitu lebih dari 0.7. Namun terdapat satu faktor yang memiliki nilai *rule of thumbs* di bawah 0.7 yaitu 0.570.
2. Variabel Transparansi Anggaran (X2) memiliki empat belas item dengan nilai loading faktor masing-masing 0,861, 0,844, 0,803, 0,794, 0,799, 0,771 yang sudah mencapai *rule of thumbs* yaitu lebih dari 0.7. Namun terdapat satu faktor yang memiliki nilai *rule of thumbs* di bawah 0.7 yaitu 0.682.
3. Variabel Partisipasi Anggaran (X3) memiliki empat belas item dengan nilai loading faktor masing-masing 0,915, 921, 829, 848 dan 0,768 yang sudah mencapai *rule of thumbs* yaitu lebih dari 0.7.
4. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) memiliki empat belas item dengan nilai loading faktor masing-masing 0,804, 0,858, 0,876, 0,849, 0,916, 0,901, 0,917, 0,909, dan 0,893 yang sudah mencapai *rule of thumbs* yaitu lebih dari 0.7.
5. Variabel Keputusan pembelian (Y) memiliki sebelas item dengan nilai loading faktor masing-masing 0,729, 0,789, 0,798, 0,753, 0,833, 0,850, 0,860, 0,889, 0,844, 0,874 dan 0,837 yang sudah mencapai *rule of thumbs* yaitu lebih dari 0.7.

**Tabel 4.7 Output Outer Loading Akhir X1,X2,X3, Z dan Y**

	Akuntabilitas	Kompetensi SDM	Kualitas Laporan Keuangan	Partisipasi Anggaran	Transparansi Anggaran	Kompetensi SDM x Akuntabilitas	Kompetensi SDM x Transparansi Anggaran
X1.1	0,864						
X1.2	0,887						
X1.3	0,902						
X1.4	0,910						
X1.5	0,896						
X1.6	0,881						
X2.1					0,867		
X2.2					0,858		
X2.3					0,805		
X2.4					0,803		
X2.6					0,787		
X2.7					0,760		
X3.1				0,915			
X3.2				0,921			
X3.3				0,829			
X3.4				0,848			
X3.5				0,768			
Y.1			0,729				
Y.10			0,789				
Y.11			0,798				
Y.2			0,753				
Y.3			0,833				
Y.4			0,850				
Y.5			0,861				
Y.6			0,889				
Y.7			0,845				
Y.8			0,874				
Y.9			0,837				
Z.1		0,804					
Z.2		0,858					
Z.3		0,876					
Z.4		0,849					
Z.5		0,916					
Z.6		0,901					
Z.7		0,917					
Z.8		0,909					
Z.9		0,893					

Kompetensi SDM x Transparansi Anggaran							1,000
Kompetensi SDM x Akuntabilitas						1,000	

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa nilai muatan (*loading*) sudah memenuhi syarat yaitu lebih dari 0,70 dan sudah dikatakan bahwa semua indikator dikatakan valid. Metode lain untuk menguji validitas yaitu dengan melihat nilai AVE dan akar kuadrat dari AVE, dengan ketentuan apakah setiap konstruk memiliki korelasi lebih besar daripada korelasi antara konstruk lainnya. Sebelum melihat korelasinya, nilai AVE dikatakan valid jika lebih besar dari 0,5 sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Akuntabilitas	0,792
Kompetensi SDM	0,776
Kualitas Laporan Keuangan	0,680
Partisipasi Anggaran	0,737
Transparansi Anggaran	0,663

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai AVE sudah lebih dari 0.5, dengan kata lain bahwa semua konstruk atau variabel Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran, Transparansi anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas laporan Keuangan sudah valid atau bisa dikatakan konstruk sudah dapat menjelaskan variansi itemnya.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator-indikator dari semua variabel penelitian yang digunakan merupakan konstruk yang baik atau tidak dalam membentuk sebuah variabel laten.

**Tabel 4.9 Pengujian Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho <sub>a</sub> )
Akuntabilitas	0,948	0,961
Kompetensi SDM	0,964	0,968
Kualitas Laporan Keuangan	0,953	0,954
Partisipasi Anggaran	0,919	1,032
Transparansi Anggaran	0,898	0,904

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Syarat yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu *composite reliability* harus lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai 0.6 – 0.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory* (Ghozali dan Latan, 2015:75). Dari hasil *output SmartPLS* di atas semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0.6

dan *cronbach's alpha* di atas 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kosntruk memiliki reliabilitas yang baik, seperti pendapat Hair *et.al* (2011) bahwa, “*rule of thumbs* nilai *alpha* atau *composite reliability* harus lebih besar dari 0.7 meskipun nilai 0.6 masih dapat diterima”.

### Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural pada PLS menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk (Ghozali dan Latan, 2015:7). *Inner model* bertujuan untuk menguji hubungan dari indikator penyusun variabel. Rangkaian uji dalam model struktural atau *inner model* adalah menghitung nilai *R-Squares*. Berikut ini model struktural penelitian PLS *Alogarthim* dan PLS *Bootstrapping*:

Berdasarkan pada gambar 4.1 Hasil *PLS Algoritma* dan gambar 4.2 Hasil *PLS Bootstrapping* di atas, maka dapat diartikan bahwa setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas menghasilkan nilai faktor *loading path* koefisien masing- masing indikator dari variabel Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran, Transparansi anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas laporan Keuangan lebih besar dari 0.7 dan nilai faktor loading T statistik pada masing- masing Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran, Transparansi anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas laporan Keuangan lebih kecil dari 1.96.

Evaluasi model struktural PLS diawali dengan melihat nilai *R-Square* setiap variabel laten dependen pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.10 Nilai *R-Square* dan *Adjusted R-Square***

	R-square	Adjusted R-square
Kualitas Laporan Keuangan	0,719	0,704

Sumber: *Output SmartPLS 4.0*, 2023.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, nilai *R-Square* variabel Kualitas laporan Keuangan (Y) sebesar 0.70% yang berarti bahwa nilai presentase tersebut memiliki pengaruh variabel Akuntabilitas, Partisipasi Anggaran, Transparansi anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan pada sebesar 72% dan sisanya 28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Hipotesis

Pengujian model hubungan struktural berfungsi untuk menjelaskan antarvariabel-variabel dalam penelitian. Untuk menilai signifikan model prediksi dalam pengujian ini dapat dilihat dari nilai t-statistik antara variabel independen ke variabel dependen. Tabel variabel *path coefficient* pada *output SmartPLS* sebagai berikut:

**Tabel 4.11 *Path Coefficients (Mean, STDEV, t-value)***

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ((O/STDEV))	Nilai P (P values)
Akuntabilitas -> Kualitas Laporan Keuangan	0,245	0,229	0,096	2,555	0,011
Kompetensi SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,697	0,703	0,045	15,537	0,000
Partisipasi Anggaran -> Kualitas Laporan Keuangan	-0,029	-0,016	0,097	0,298	0,766
Transparansi Anggaran -> Kualitas Laporan Keuangan	0,325	0,330	0,101	3,216	0,001

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Nilai *path coefficient* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis, berikut adalah penjelasan dari hasil *path coefficient*:

- Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik sebesar  $2,555 < 1.65$  karena  $t_{hitung} < T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.01) < 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.
- Hasil pengujian menunjukkan pengaruh Antara Transparansi anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik sebesar  $15,537 > 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.000) > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.
- Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar  $0,298 < 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.766) > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.
- Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah signifikan dengan T-statistik sebesar  $3,216 > 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.001) > 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.

### Uji Efek Moderasi

Uji moderasi dilakukan untuk mendeteksi kedudukan variabel pada sebuah model. Pengujian moderasi dilakukan melalui *output* parameter uji signifikan dilihat berdasarkan pada tabel total *effect* bukan pada tabel koefisien, karena pada efek moderasi tidak hanya dilakukan pengujian pengaruh langsung (*direct effect*) variabel bebas ke variabel terikat, tetapi juga menguji pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui variabel moderasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.12 Effect Pengujian Tidak Langsung Antara Variabel Independen Dengan Variabel Dependen Melalui Variabel Moderasi**

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
Kompetensi SDM x Akuntabilitas -> Kualitas Laporan Keuangan	-0,163	-0,172	0,093	1,762	0,078
Kompetensi SDM x Transparansi Anggaran -> Kualitas Laporan Keuangan	-0,300	-0,289	0,084	3,567	0,000

Sumber: *Output SmartPLS 4.0, 2024.*

Selain tabel di atas, pengaruh secara tidak langsung yang disertai dengan variabel moderasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- a) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak berpengaruh signifikan dengan T-statistik kecil  $1.762 < 1.65$  karena  $t_{hitung} < T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.07) > 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan.
- b) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi Transparansi anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik sebesar  $3.567 > 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.000) > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi Transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.

## Pembahasan

### Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis pertama pengaruh antara Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik sebesar  $2,555 < 1.65$  karena  $t_{hitung} < T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.01) < 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Good Governance yang mengharuskan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan hasil kinerjanya. Dalam konteks laporan keuangan, akuntabilitas berperan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya tepat dan akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban maka prinsipal memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai agen untuk dapat menjalankan pengelolaan pemerintah yang baik termasuk dalam tanggung jawab melaporkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak prinsipal. Adanya hubungan baik antara pemerintah daerah dan prinsipal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Philadelphie et al., 2020).

Akuntabilitas merupakan tindakan tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Yaya & Wahyuli, 2019). Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting dan menjadi kebutuhan untuk menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.

Penelitian terbaru oleh Lestari et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Di sisi lain, rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas dan reliabilitas informasi yang disajikan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan ((Pratiwi et al., 2022); (Murniati, 2021); (Vidyasari & Suryono, 2021); dan (Liu, 2020)) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

### **Pengaruh Transparansi Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis kedua pengaruh Antara Transparansi anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan dengan T-statistik sebesar  $15,537 > 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value ( $0.000 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Transparansi memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat tergantung pada sejauh mana informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh publik serta otoritas pengawas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Transparansi merupakan cara pemerintahan menunjukkan kepada publik pekerjaan yang telah dilakukan secara bersih dan jujur, termasuk informasi tentang strategi, formulasi dan implementasinya, dan hasil yang dicapai (Yaya & Wahyuli, 2019). Dalam hal ini pemerintah memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik bagi mereka yang butuh informasi yang bebas dan mudah tentang proses penerapan keputusan yang dipilih.

Berkaitan dengan teori keagenan dimana pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang mudah kepada masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki hak untuk memahami laporan keuangan dari pemerintah daerah sebagai alat untuk pengambilan keputusan langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Maka dapat dikatakan bahwa transparansi menjadi pendukung kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah (Philadelphiah et al., 2020).

Studi terbaru oleh Napitupulu et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi keuangan meningkatkan kepercayaan publik dan memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian dari Susanto dan Rahayu (2022) mengungkapkan bahwa transparansi juga berdampak pada akuntabilitas dan kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga meminimalisir potensi kesalahan atau manipulasi data. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Pratiwi et al., 2022); (Rahayu & Dewi, 2022); (Murniati, 2021); dan (Suryani & Ismail, 2018) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis ketiga pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar  $0,298 < 1.65$  karena  $t_{hitung} > T_{tabel}$ , dan nilai P Value ( $0.766 > 0.05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Partisipasi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam *Good Governance* yang mengharuskan keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek keuangan. Dalam konteks keuangan daerah, partisipasi masyarakat dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan keuangan, proses pembuatan laporan keuangan menjadi lebih terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian terbaru oleh Arifin et al. (2023) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik untuk menciptakan kontrol sosial yang kuat. Studi ini menyimpulkan bahwa daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan keuangan, seperti melalui forum anggaran terbuka atau mekanisme feedback, cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan relevan.

Partisipasi anggaran merupakan peran serta individu atau aparatur pemerintahan dalam menyalurkan tujuan, pertimbangan, serta kepentingannya dalam penyelenggaraan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Bentuk partisipasi anggaran dapat ditunjukkan dengan adanya andil aparatur pemerintah dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, maupun pengelolaan keuangan yang baik (Pratiwi et al., 2022).

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa aparatur pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam penyusunan anggaran, namun juga ikut andil dalam manajemen keuangan hingga pemerintah daerah melaporkan segala kegiatannya berupa laporan keuangan. Apabila aparatur pemerintahan berpartisipasi dengan baik dalam penyusunan anggaran dan manajemen keuangan, maka kualitas laporan keuangan yang telah disusun pemerintah akan meningkat (Philadelphphia et al., 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan ((Pratiwi et al., 2022); (Imelia et al., 2021); dan (Suryani & Ismail, 2018)) menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan T-statistik sebesar  $3,216 > 1,65$  dan P-value  $0,001 < 0,05$ . Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi ini mencakup pemahaman teknis, keterampilan akuntansi, serta kemampuan manajerial yang relevan dalam memenuhi standar pelaporan keuangan.

Dari perspektif teori keagenan, kompetensi SDM berperan penting dalam meminimalkan konflik antara pihak manajemen (agen) dan pemilik atau pemangku kepentingan (prinsipal). Kompetensi yang tinggi memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat, mengurangi asimetri informasi, dan memberikan transparansi yang dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Sementara itu, teori stewardship menekankan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan cenderung bertindak sebagai steward, berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi dan mempertahankan kepentingan pemangku kepentingan melalui pelaporan yang berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa studi terdahulu. Penelitian oleh Yulianti dan Maharani (2020) menemukan bahwa kompetensi SDM secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yulianti & Maharani, 2020). Penelitian oleh Wardani et al. (2019) menegaskan pentingnya kompetensi SDM dalam meningkatkan akurasi pelaporan keuangan sektor publik (Wardani et al., 2019). Selanjutnya, studi oleh Pratama dan Zulfikar (2021) menunjukkan bahwa pengembangan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi profesional berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan (Pratama & Zulfikar, 2021). Penelitian Supriyadi (2020) menyoroti bahwa SDM yang kompeten dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan (Supriyadi, 2020). Akhirnya, studi Setiawan et al. (2018) menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki efek positif terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan daerah (Setiawan et al., 2018).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya kompetensi SDM sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik dalam konteks sektor publik maupun swasta. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pengembangan profesional, dan insentif yang memadai harus menjadi prioritas bagi organisasi yang ingin memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan andal.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia Tidak Memoderasi Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis keenam pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak berpengaruh signifikan dengan T-statistik kecil  $1.762 < 1.65$  karena  $t_{hitung} < T_{tabel}$ , dan nilai P Value  $(0.07) > 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Penerapan prinsip akuntabilitas yang efektif sangat bergantung pada kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami tanggung jawab mereka dan mampu mengelola kewajiban pelaporan secara profesional. Sumber Daya Manusia yang kompeten akan memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas diterapkan dengan benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi transparansi dan tanggungjawab terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber Daya Manusia yang kompeten akan mampu mengelola informasi keuangan dengan lebih baik dan memastikan bahwa standar transparansi terpenuhi. Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keuangan, akuntansi, dan pelaporan sangat krusial dalam memastikan bahwa data yang transparan juga disajikan dengan cara yang dapat dipahami dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, hipotesis ini menyatakan bahwa pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan akan lebih kuat ketika kompetensi Sumber Daya Manusia tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisanatalia (2024), menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan prinsip tanggung jawab berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia Memoderasi Transparansi Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) mampu memoderasi hubungan antara transparansi anggaran dan kualitas laporan keuangan secara signifikan, sebagaimana dibuktikan oleh T-statistik sebesar  $3,567 > 1,65$  dan P-value  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan SDM yang kompeten dalam proses partisipasi anggaran dapat memperkuat pengaruh positif transparansi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM berperan dalam memastikan bahwa hasil dari transparansi anggaran, seperti perencanaan yang realistis, dan responsif, dapat diimplementasikan secara efektif dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori keagenan dan teori stewardship. Dalam teori keagenan, hubungan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) sering menghadapi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Transparansi anggaran menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik ini, karena memberikan kejelasan dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan. Teori ini juga mengakui bahwa tanpa kompetensi SDM yang memadai, transparansi tidak akan efektif, karena laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan pemahaman teknis dan etika yang tinggi. Sementara itu, teori *stewardship* berfokus pada hubungan berbasis kepercayaan dan orientasi kolektif. Dalam konteks ini, SDM yang kompeten berperan sebagai "steward" yang tidak hanya menjalankan tugas dengan akuntabilitas tetapi juga berupaya maksimal demi kepentingan organisasi. Dengan kompetensi yang tinggi, SDM dapat memanfaatkan transparansi anggaran untuk menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya akurat tetapi juga relevan dan dapat diandalkan.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Muda et al. (2018), yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM meningkatkan efektivitas transparansi dalam menghasilkan laporan berkualitas. Terdapat juga beberapa penelitian lain, seperti studi oleh Kusuma (2016), menemukan bahwa transparansi anggaran tidak selalu meningkatkan kualitas laporan keuangan ketika SDM kurang memiliki kemampuan dan integritas yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa dukungan SDM yang kompeten, transparansi hanya akan menjadi formalitas yang tidak berdampak signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi transparansi anggaran dan kompetensi SDM merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil ini, organisasi perlu mengutamakan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses anggaran, baik melalui pelatihan teknis maupun peningkatan pemahaman mereka terhadap regulasi keuangan. Kompetensi ini akan memastikan bahwa transparansi anggaran tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah

- a) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan.
- b) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh Antara Transparansi anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan.
- c) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Partisipasi Anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak signifikan.
- d) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah.
- e) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh antara Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memoderasi Akuntabilitas terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah tidak berpengaruh signifikan.
- f) Hasil pengujian menunjukkan pengaruh Antara Kompetensi Sumber Daya Manusia memoderasi Transparansi anggaran terhadap Kualitas laporan Keuangan adalah berpengaruh signifikan.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran saran dalam penelitian ini adalah

1. Bagi sekretariat Halteng  
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk bisa lebih

memperkuat akuntabilitas melalui implementasi sistem pengawasan internal yang lebih efektif dan mekanisme pelaporan yang transparan. Selain itu, penetapan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pejabat keuangan perlu diprioritaskan untuk memastikan akuntabilitas berjalan optimal. Kedua, mendorong partisipasi anggaran dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan organisasi lokal, dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran. Partisipasi yang inklusif akan membantu menciptakan kebijakan keuangan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, meskipun transparansi anggaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini, pemerintah tetap harus memperkuat transparansi melalui publikasi laporan keuangan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Keempat, investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia sangat penting. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintah untuk meningkatkan keahlian pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Terakhir, sinergi antara kompetensi SDM dan partisipasi anggaran perlu diperkuat untuk memastikan proses penyusunan anggaran yang lebih efisien dan berkualitas..

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini yang tertarik mengembangkan penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak variabel independen yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti tata kelola pemerintahan, budaya organisasi, atau teknologi informasi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi peran transparansi anggaran secara lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara dengan pengelola keuangan daerah, untuk memahami mengapa variabel ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Peneliti juga dapat melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah Halmahera Tengah. Selanjutnya, moderasi variabel lain, seperti leadership atau gaya kepemimpinan, dapat diteliti untuk memahami hubungan yang lebih kompleks antara variabel-variabel tersebut dan kualitas laporan keuangan. Akhirnya, dengan menggunakan metode longitudinal, peneliti dapat mengamati perubahan dan dampak kebijakan tertentu terhadap kualitas laporan keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Achmadi, A., Muslim, M. dkk. (2002). Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Aziza, N., & Aviola, N. K. (2024). The Influence of Corporate Governance on Financial Performance With Risk Management as Mediating Variable. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 11–21. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.11>
- Erikha Viyurintina, E. S. (2024). *Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan*. 2(4).

- Imelia, D., Rahayu, S., & Wiralestari, W. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kerinci. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(3), 149–163.
- Jauhari, H., Sari, Y., & Dewata, E. (2019). Implementation of good governance, utilization of information technology and reliability of government financial statement. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 117–126.
- Kasian, M. A., Rukayyah, A., & ... (2024). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah Di Badan Pendapatan Daerah Kota .... *Musytari: Neraca* ..., 8, 26972–26981. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2562%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/download/2562/2412>
- Krisanatalia, S., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2024). Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi pada GKJW Rejoagung. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 96-102.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Dj, H. F. S., Siti, O. :, Kristina, R., Naukoko, A. T., Dj Siwu, H. F., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). the Effect of Local Revenue (Pad) and Balancing Funds on the Regional Financial Independence of Central Halmahera District. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 453–461.
- Liu, M. S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahmudi. (2021). *FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*. 8(2), 179–188.
- Maimanah, A., & Nurdiono, N. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 3(2), 178–202.
- Makalikis, D. C., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekretariat DPRD Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 285–292. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/37352/34672>
- Mardatilla, S. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Masnila, N., Mayasari, R., Firmansyah, F., Febriantoko, J., & Said, J. (2021). The Effect of Good Government Governance on the Financial Reports Quality: The Case of Provincial Capital Governments in Indonesia. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), 270–287.
- Masnun, M. (2018). Good Governance Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian Di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(1), 175. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.41>
- Murniati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan

- Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah. *EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 16(2), 139–148.
- Pitoy, R. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2022). Reaksi Pasar Modal Terhadap Disahkannya RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada Emiten Perbankan. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(1)
- Philadelphphia, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pratiwi, N. R., Diana, N., & Junaidi, J. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(05).
- Purwanti, A. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>
- Putri, A., & H. Simanjuntak, B. (2023). the Moderating Role of the Government Internal Control System on Factors Influencing the Quality of Local Government Financial Reports. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 181–198. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.356>
- Rizky Izzalqurny, T., Handayati, P., & Mutiarin, Z. (2023). Revealing Good Governance in Regional Financial Reporting (Case Study on Banyuwangi Regency Government). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(10), 5189–5197. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-52>
- Saleh, H., Rosadi, I., Manda, D., Maulana, Z., & Idris, S. (2021). The Effect of Good Governance on Financial Performance: An Empirical Study on the Siri Culture. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 795–806.
- Sova, M., & Rosmiati, E. (2022). *The Effect of Audit Competence on Regional Financial Performance Moderated by the Internal Control System*. 4(1). <http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>
- Suryani, E., & Ismail, I. (2018). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Aceh Besar. *KOLEGIAL*, 6(1), 78–87.
- Tangngisalu, J., & Jumady, E. (2020). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi: Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan LQ 45. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1)
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Wiguna, M. B. S. (2019). No Title. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- Yaya, R., & Wahyuli, H. (2019). Determinants of Financial Statements Quality in Village Government. 5th International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2019), 134–138.